

**ANALISIS FAKTOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT  
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : MADE SHINTA SEKAR AYU**

**NIM : 126232101**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS FAKTOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT**  
**HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : MADE SHINTA SEKAR AYU**  
**NIM : 126232101**

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2024**

**ANALISIS FAKTOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT  
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**Disusun Oleh:**



**Made Shinta Sekar Ayu**

**126232101**

**Disetujui Oleh :**

**Dosen Pembimbing**



**F.X. Kurniawan Tiakrawala S.E., M.Si., Ak., CA.**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang. Dengan mengadopsi pendekatan studi kasus melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada Inspektorat Daerah. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, termasuk pejabat Inspektorat dan auditor yang bertanggung jawab atas pemanfaatan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD). Data sekunder, seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD), juga dianalisis secara komprehensif.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut masih terkendala oleh keterbatasan tenaga ahli, rendahnya kompetensi teknis, serta kendala geografis. Hingga tahun 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi baru mencapai 63,21%, jauh di bawah target minimal 75% yang ditetapkan BPK. Meski demikian, Kabupaten Kupang tetap berhasil mempertahankan *unqualified opinion* atas LKPD sejak tahun 2022. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan mitigasi hambatan logistik guna mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi serta menjaga keberlanjutan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Tantangan Penyelesaian Tindak Lanjut.

## ***ABSTRACT***

The purpose of this study is to examine the variables influencing the implementation of the audit recommendations made by the Supreme Audit Board (BPK) regarding the Kupang Regency's Local Government Financial Report (LKPD). This study uses a case study methodology and a qualitative descriptive method to examine the Inspectorate of Kupang Regency. Data were collected through in-depth interviews with key informants, including the Secretary of the Regional Inspectorate, Functional Supervisors, and an Auditor as the Administrator of the State/Regional Loss Information System (SIKAD). Documentation of pertinent reports, including Audit Reports (LHP), Semester Audit Reports (IHPS), and Regional Audit Reports (IHPD), provided secondary data. The results show that the follow-up procedure has a number of obstacles, such as a lack of human resources, a lack of knowledge about the SIKAD application, and logistical issues brought on by Kupang Regency's vast and tough terrain. Furthermore, as of 2023, only 63.21% of the suggestions have been put into practice, falling short of the BPK-established minimum of 75%.

Kupang Regency has shown a dedication to enhancing financial governance by effectively maintaining an unqualified opinion (WTP) on its financial report since 2022 in spite of these obstacles. This study comes to the conclusion that strengthening the follow-up process requires eliminating logistical obstacles, increasing human resource capability, and maximizing stakeholder collaboration. Maintaining the WTP status of Kupang Regency's financial reporting and meeting BPK's follow-up goals depend on these activities.

**KEYWORDS:** Follow-Up on Audit Recommendations; Local Government Financial Reports; Follow-Up Completion Challenges

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih yang telah diberikan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA, selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. F. X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Program Studi PPA Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Orang tua dan keluarga, atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman-teman mahasiswa PPA Batch 34 BPK Perwakilan Provinsi NTT yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Diluar dari itu Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengguna informasi dari tugas akhir ini. Penulis juga memohon maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir terdapat kesalahanan baik lisan maupun tulisan.

Jakarta, Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Made Shinta Sekar Ayu', written in a cursive style.

Made Shinta Sekar Ayu

## DAFTAR ISI

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b> | <b>I</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>II</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                     | <b>III</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>IV</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                          | <b>VI</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                        | <b>VIII</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>    |
| 1.1    LATAR BELAKANG.....                       | 1           |
| 1.2    RUMUSAN MASALAH .....                     | 2           |
| 1.3    TUJUAN PENELITIAN .....                   | 3           |
| 1.4    MANFAAT PENELITIAN .....                  | 3           |
| 1.5    SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....               | 3           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>               | <b>5</b>    |
| 2.1    KAJIAN TEORI .....                        | 5           |
| 2.2    TINJAUAN PUSTAKA.....                     | 8           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>           | <b>9</b>    |
| 3.1    OBJEK PENELITIAN.....                     | 9           |
| 3.2    METODE PENELITIAN .....                   | 11          |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>          | <b>13</b>   |
| 4.1    PROSES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT .....   | 13          |
| 4.2    FAKTOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT .....   | 15          |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>          | <b>19</b>   |
| 5.1    KESIMPULAN.....                           | 19          |

|                            |            |           |
|----------------------------|------------|-----------|
| 5.2                        | SARAN..... | 19        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> |            | <b>21</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 ..... | 9  |
| Tabel 4. 1 Status Penyelesaian TLRHP LK Pemkab Kupang .....            | 15 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengelola keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, tertib, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berperan memastikan keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengurusan anggaran belanja maupun pendapatan daerah. LKPD harus memberikan informasi yang disyaratkan sesuai regulasi yang berlaku dan relevan bagi pengguna dalam mengambil keputusan. Pengguna LKPD antara lain masyarakat, lembaga perwakilan, lembaga pengawas, serta pemeriksa.

Sesuai peraturan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai institusi yang bersifat mandiri, mengaudit laporan keuangan pemerintah untuk memastikan ketaatan pada regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa akan menyusun dokumen hasil pemeriksaan yang dikenal sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil pemeriksaan BPK disertai dengan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Banyak pihak berpendapat bahwa penerbitan LHP merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan sekaligus menandai selesainya keterlibatan pemeriksa (Suryadnyana, Mursalim, & Nurwanah, 2023). Namun masih ada proses dimana pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan rentang waktu 60 (enam puluh) hari.

Tindak lanjut (TL) atas rekomendasi, merupakan elemen penting dalam mendukung visi BPK yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis. Sebagai lembaga pemeriksa yang kredibel, BPK menjalankan peran strategis untuk mendukung pencapaian keuangan pemerintah yang baik dan berdaya guna dalam meraih tujuan pembangunan nasional. BPK juga melaksanakan kegiatan pemantauan atas TL rekomendasi yang disampaikan pihak yang diperiksa setiap semester atau setiap enam bulan dalam satu tahun anggaran. Hasil pemantauan ini dituangkan dalam dokumen

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) (Sanjaya, Astuti, Wijayanto, & Lituhayu, 2023). Selain memantau TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di pemerintah pusat, khususnya pada kementerian / lembaga / BUMN dan instansi lainnya, BPK juga memantau pelaksanaan TL rekomendasi hasil pemeriksaan pemerintahan daerah yang menghasilkan output Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).

Kabupaten Kupang menerima *unqualified opinion* dari BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur (BPK NTT) sejak Tahun 2022. Namun, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi berdasarkan data IHPD NTT Tahun 2023 hanya mencapai 63,21%, yang masih berada di bawah batas minimal 75% yang ditetapkan oleh BPK Perwakilan NTT. Artinya, masih terdapat 36,79% rekomendasi yang belum diselesaikan, menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Kupang untuk terus memperbaiki dan memaksimalkan proses tindak lanjut. Upaya ini penting dilakukan agar target yang ditetapkan oleh BPK dapat tercapai, sekaligus memastikan status opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

Implementasi rekomendasi tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, yang dapat memengaruhi efektivitas tindak lanjutnya. Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari BPK merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kupang telah menjadi fokus studi ini untuk mengevaluasi bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi BPK diimplementasikan dan dioptimalkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada pembahasan yang telah dijabarkan, penelitian ini mengidentifikasi masalah utama yang dirumuskan berikut ini.

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak lanjut rekomendasi di Pemerintah Kabupaten Kupang?
- b. Bagaimana tingkat penyelesaian TL rekomendasi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang?

- c. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan berikut ini:

- a. Untuk mengevaluasi proses penyelesaian TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.
- b. Untuk mengidentifikasi tantangan dalam proses penyelesaian TL rekomendasi dan bagaimana mengatasinya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diasumsikan menghasilkan manfaat, bagi peneliti serta pihak yang menjadi objek penelitian dengan rincian berikut.

Manfaat bagi peneliti adalah

- a. Mengimplementasikan teori berdasarkan hasil perkuliahan; dan
- b. Dapat mengidentifikasi dan menilai proses tindak lanjut suatu entitas.

Manfaat bagi objek penelitian adalah

- a. Dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki proses tindak lanjut yang telah berjalan; dan
- b. Mengidentifikasi penghambat proses penyelesaian tindak lanjut.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan navigasi pada karya akhir ini, sistematika penyajian disusun berikut.

- a. Bab I: Pendahuluan – Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan, serta sistematika penulisan.

- b. Bab II: Tinjauan Pustaka – Mengulas teori dan literatur yang relevan tentang audit, rekomendasi BPK, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.
- c. Bab III: Metodologi Penelitian – Menjelaskan desain penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan.
- d. Bab IV: Hasil Pembahasan – Menyajikan temuan hasil penelitian, analisis implementasi, tantangan, dan strategi optimalisasi.
- e. Bab V: Kesimpulan dan Saran – Menyimpulkan temuan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asidik, M. S., & Tjakrawala, F. (2024, July 4). Quality Control and Quality Assurance of The BPK's Audit of Regional Government Financial Statements Fiscal Year 2022 (Case Study at AKN VI). *International Journal of Current Science Research and Review*, Vol 7, No. 7(2581-8341 ), 4686-4694.
- Budaya, A., & Sugiri, S. (2019). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016. *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol 7, No. 4(2302-1500).
- BPK RI. (2017). Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK BPK NTT. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).
- Harinurhady, A., Rifa'i, A., & Alamsyah. (2017, April). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. *Journal Economica*, Vol. 13, No. 1.
- Lambo, Y. V., & Ritonga, I. T. (2023, May). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Temuan Berulang (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi NTT). *Accounting Business and Information Systems Journal*, Vol 11. No 2 .
- Nurhayati, A., Sudjana, & Ishak, J. F. (2022, Oktober). Analisis Faktor Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Temuan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Kabupaten Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol 3, No. 1(pp. 84-92).
- Sanjaya, N., Astuti, R. S., Wijayanto, A., & Lituhayu, D. (2023). Follow-up implementations on audit results in the local government of Banten Province. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 9 Number 2(331-347).

Suryadnyana, N. A., Mursalim, & Nurwanah. (2023, Januari). Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas dan Penggunaan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, Volume 1, Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.